

## **BAB 1.PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau UMKM merupakan kategori bisnis berskala kecil yang dipercaya mampu memberikan kontribusi terhadap perekonomian Indonesia. UMKM sebagai sarana untuk menciptakan lapangan kerja dan mendorong kemajuan perekonomian serta menciptakan sektor swasta sehingga pengembangan dari UMKM berperan penting dalam pembangunan ekonomi. (Harahap, 2019). Dalam menjalankan aktivitasnya, UMKM membutuhkan pasokan modal yang cukup untuk menjaga produktivitasnya dalam memenuhi kebutuhan pasar. Melalui peningkatan modal bagi UMKM, hal ini akan meningkatkan peluangnya untuk melakukan ekspansi pasar dengan meningkatkan jumlah output yang dihasilkan.(Alghifary et al., 2021)

Peranan UMKM yang begitu besar ditunjukkan dengan jumlah total unit usaha sebanyak 99% dari usaha yang ada berdasarkan hasil data dari Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2013. Perkembangan jumlah UMKM pun mengalami peningkatan sebesar 2.41% pada tahun 2011-2012. Keberadaan UMKM yang mendominasi ini menjadi bukti bahwa UMKM berperan penting dalam pertumbuhan perekonomian melalui aktivitasnya. Banyaknya jumlah unit UMKM yang ada memberikan pengaruh positif dalam hal penyerapan tenaga kerja. Sektor UMKM mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 101.7 juta orang pada tahun 2011 dan 107.6 juta orang pada tahun 2012 dari total angkatan kerja yang bekerja dengan peningkatan jumlah penyerapan tenaga kerja sebesar 5.83%. Selain itu UMKM dengan segala keterbatasannya mampu bertahan pada saat krisis moneter yang melanda Indonesia pada tahun 1997 yang mana hampir 80% usaha besar mengalami kebangkrutan dan menyebabkan terjadinya PHK massal. (Tunas, 2019)

Selama ini UMKM masih mempunyai permasalahan yang belum sepenuhnya terpecahkan. Permasalahan tersebut diantaranya berupa kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas, kurangnya bimbingan dan pembinaan dari pihak terkait, teknologi yang rendah, sumber daya modal yang kurang, manajemen yang masih tradisional, infrastruktur yang belum memadai, sulitnya memperoleh bahan baku, sulitnya memperoleh ijin usaha atau badan hukum, sulitnya memasarkan produk

yang dihasilkan, dan masalah lainnya. Sehingga dari berbagai permasalahan tersebut memberikan pengaruh bagi keberadaan UMKM. Hal tersebut sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Yustika (2005) bahwa UMKM selalu terjebak dalam problem keterbatasan modal, teknik produksi, pemasaran, manajemen, dan teknologi. Hafsah dalam Yustika (2018) dan Koncoro (2020) juga mengungkapkan permasalahan dasar yang dihadapi UMKM diantaranya adalah kurangnya pembinaan, kelemahan di bidang organisasi, bimbingan manajemen yang kurang maksimal, dan kualitas sumber daya manusia yang belum baik. Permasalahan yang dihadapi oleh UMKM tersebut tidak dapat diabaikan begitu saja, mengingat sumber penghidupan bagi sebagian besar rumah tangga saat ini masih bergantung kepada sektor tersebut. Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi serta meningkatkan peranan UMKM diperlukan strategi yang tepat maupun kebijakan yang komprehensif dan berkelanjutan. Lebih lanjut dalam tulisan ini akan membahas bagaimana memecahkan permasalahan yang selama ini melakat di sektor tersebut dengan menggunakan strategi dan kebijakan yang tepat, komprehensif, dan berkelanjutan, agar sektor tersebut tetap memberikan kontribusi yang besar bagi perekonomian nasional

Provinsi dengan jumlah penduduk miskin terbanyak di Indonesia adalah provinsi Jawa Timur yaitu sebesar 4.334.638 jiwa pada tahun 2018. Besarnya jumlah penduduk miskin di Jawa Timur disebabkan karena adanya ketimpangan antara pencari pekerjaan dengan lapangan pekerjaan yang tersedia di Jawa Timur sehingga banyak yang tidak memiliki pekerjaan atau menganggur dan tidak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya. Dalam perekonomian Indonesia, UMKM merupakan kegiatan ekonomi rakyat yang keberadaannya mendominasi yakni lebih dari 99% dalam perekonomian nasional. Usaha ini menjadi pilihan banyak masyarakat karena pengelolaan usahanya yang sederhana, memerlukan modal yang relatif kecil, serta fleksibilitas dalam aktivasnya. Peran keberadaan UMKM yang paling terlihat adalah kemampuan dalam penyerapan tenaga kerja dengan kata lain mengurangi pengangguran. Selain itu peran UMKM mampu meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga dapat memperbaiki taraf hidup artinya mengurangi kemiskinan. Menurut data (Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur,

2017), kontribusi UMKM terhadap PDB sebesar 61,4% serta menyerap tenaga kerja hingga 97% dari total tenaga kerja nasional. UMKM menjadi tumpuan harapan masyarakat karena lebih mampu bertahan di masa kritis oleh sebab itu UMKM dikatakan sebagai motor penggerak perekonomian daerah maupun nasional. (Anugerah & Nuraini, 2021)

Jember tercatat sebagai kabupaten dengan jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) terbanyak di Jawa Timur. Tak kurang dari 647.416 UMKM, dan 612.072 merupakan Usaha Mikro. Ini satu hal yang menjanjikan untuk perekonomian Jember. Diketahui, UMKM teruji tetap eksis di tengah badai krisis. Bahkan mampu jadi tulang punggung perekonomian nasional. Pun, menampung tenaga kerja yang cukup banyak. Hanya, untuk bisa berkelanjutan, tak sedikit dari pelaku UMKM tersebut terbatas dalam permodalan. Karenanya, mereka sangat menyambut progam Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang diluncurkan Pemerintah. "UMKM ini perlu penambahan modal, tapi mereka perlu disosialisasi cara mendapatkan pembiayaan KUR, juga mengelola dananya agar UMKM-nya bisa naik kelas dan berdaya saing," ujar Bupati Jember Ir H Hendy Siswanto, ST., IPU di Aula Bank Jatim. Pimpinan Cabang Bank Jatim Jember, Wawan Budi Rachmanto, menjelaskan KUR diberikan kepada usaha produktif UMKM, tanpa jaminan dan suku bunganya 3 persen saja setahun. Tiga macam KUR, super mikro, kerap disebut supermi, lalu mikro dan kecil. KUR supermi maksimal kredit Rp10 juta. Menjadi komitmen Bupati Hendy memajukan UMKM di Kabupaten Jember. "KUR ini salah satu program istimewa Pemerintah untuk membantu masyarakat dalam menjalankan usaha. Ada kredit super mikro di kisaran Rp5-10 juta, bunga 3 persen setahun, dasarnya saling percaya dan bertanggung jawab. Jadi, tanpa jaminan atau syarat yang memberatkan," imbuh Bupati Hendy. Pemkab Jember sendiri, jelasnya lagi, berkewajiban menciptakan lingkungan yang kondusif bagi sektor usaha UMKM. Di antaranya, menciptakan acara-acara yang melibatkan UMKM bisa menjajakan produk usahanya. Dengan kata lain, menciptakan 'pasar' bagi UMKM. (hariansuara.com, 2023) Menurut Kasmir (2018:96), pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan

pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM memberikan pengertian dan klasifikasi berdasarkan aset dan omzet tiap skala usaha sebagai berikut:

**Tabel 1. 1**  
**Klasifikasi UMKM Berdasarkan Aset dan Omzet**

Skala Usaha	Kriteria	
	Kekayaan Bersih/Aset (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha)	Hasil Penjualan/Omzet
Usaha Mikro	Maksimal Rp50 juta	Maksimal Rp300 juta
Usaha Kecil	>Rp50 juta-Rp500 juta	>Rp300 juta-Rp2,5 Miliar
Usaha Menengah	>Rp500 juta-Rp10 miliar	>Rp2,5 Milyar-Rp50 Miliar

Sumber : Silalahi, 2022

Pada tabel 1.1 menjelaskan secara umum UMKM rentan mengalami berbagai masalah di bidang permodalan, tak terkecuali UMKM di Pasar Pancasila Kota Tasikmalaya. Permodalan menjadi salah satu kendala utama dalam pengembangan usaha, hal ini terlihat dari banyaknya pelaku usaha yang masih menggantungkan penambahan modal dari rentenir. Di satu sisi peminjaman kepada rentenir atau lembaga non-bank kerap dilakukan karena proses transaksinya cepat dan jaminan pinjaman hampir tidak ada. Faktor lain yang mendukung adalah ketidakstabilan pendapatan yang didapat pelaku usaha membuat pihak perbankan sulit untuk memberikan pinjaman kredit. Kelemahan pinjaman dari rentenir ini adalah tingkat bunga yang sangat tinggi. Tidak heran jika banyak usaha mengalami kebangkrutan. (Silalahi, 2022)

Begitu besarnya potensi UMKM, namun masih banyak permasalahan yang dihadapi UMKM. Adapun masalah umum yang dihadapi para pelaku UMKM yaitu keterbatasan modal kerja maupun investasi, kesulitan-kesulitan dalam pemasaran, distribusi pengadaan bahan baku dan input lainnya, keterbatasan akses informasi mengenai peluang pasar dan lainnya, keterbatasan pekerja dengan keahlian yang tinggi (kualitas SDM rendah) dan kemampuan teknologi, biaya transportasi dan

energi yang tinggi, keterbatasan komunikasi biaya tinggi akibat prosedur administrasi dan birokrasi yang kompleks khususnya dalam pengurusan izin usaha, dan ketidakpastian akibat peraturan dan kebijaksanaan ekonomi yang tidak jelas atau tidak menentu arahnya. Permasalahan yang dihadapi oleh UMKM yang mempengaruhi tingkat pendapatan yang diperoleh UMKM yaitu modal usaha, adalah permasalahan yang sering dihadapi oleh pelaku UMKM, sehingga hal ini menyebabkan ruang gerak UMKM sangat sempit (kesulitan dalam mengembangkan usahanya). Oleh karena itu, perlu adanya upaya dari UMKM untuk mengajukan pembiayaan mikro syariah ke lembaga keuangan syariah untuk memenuhi modal usaha agar dapat mengembangkan usahanya. (Tambunan, 2018)

Secara teoritis, beberapa pendapat mengemukakan bahwa terdapat beberapa komponen utama yang menentukan usaha produktif dari kelompok masyarakat dapat tumbuh dan berkembang dengan efektif, yaitu: 1) modal kerja; 2) teknologi tepat guna; 3) model manajemen usaha; 4) pengembangan ketrampilan (menyangkut pemanfaatan modal kerja, teknologi, dan manajemen usaha); 5) etos kerja, semangat, disiplin kerja, dan lain sebagainya. (Turang, 1995)

Pelatihan sangat erat kaitannya dengan manajemen sumber daya manusia yang meliputi aspek perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan, serta evaluasi. Artinya jika suatu usaha ingin menghasilkan pendapatan yang optimal, maka kualitas atau kinerja dari sumber daya manusianya pun harus ditingkatkan dan dikembangkan. Salah satu alternatif utama yang dapat dilakukan adalah dengan cara memberikan pendidikan dan pelatihan yang memadai dan sesuai dengan tuntutan pekerjaannya. Dalam dunia usaha, selain pelatihan, modal merupakan hal yang sangat penting terutama peranannya dalam meningkatkan pendapatan. Hal ini sesuai dengan pendapat dari Korompis (2005) yang menyebutkan bahwa komponen utama yang menentukan tumbuh dan berkembangnya suatu usaha adalah modal kerja; teknologi tepat guna, model manajemen usaha; pengembangan ketrampilan dalam pemanfaatan modal kerja; semangat, disiplin, dan ethos kerja. Artinya, tanpa modal yang memadai setiap usaha akan mengalami kesulitan dalam proses kerja dan pengembangan usaha dalam upaya peningkatan pendapatan. (Amalia, 2018)

Perkembangan usaha bagi usaha mikro kecil dan menengah sebagai kesuksesan dalam berusaha yang dapat dilihat jumlah penjualan yang semakin meningkat dan pendapatan yang meningkat dikarenakan dari kemampuan pengusaha dalam meraih peluang usaha yang ada, berinovasi, luasnya pasar yang dikuasai, mampu bersaing, mempunyai akses yang luas terhadap lembaga keuangan baik bank dan non bank sehingga dapat meningkatkan pembiayaan usahanya. (Purwanti, 2019) Perkembangan potensi UMKM di Indonesia tidak terlepas dari dukungan perbankan dalam penyaluran pembiayaan kepada pelaku UMKM. Peran perbankan syariah dalam mengembangkan usaha masyarakat terutama pada usaha mikro adalah dengan berpartisipasi memberikan pembiayaan kepada masyarakat untuk mengembangkan usahanya, baik usaha perorangan maupun usaha dalam bentuk kelompok, dengan harapan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi masyarakat dari tahun-ketahun terus mengalami peningkatan. Bank Sebagai lembaga perantara penyalur dana dari pihak surplus unit kepada pihak deficit unit berupaya dalam mendukung pelaksanaan pembangunan dengan jalan menghimpun dana atau simpanan dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito dan tabungan. Kemudian dana-dana yang telah terhimpun tersebut oleh bank disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak sesuai dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 pasal 1 butir 2 tentang perbankan. (Kasmir, 2018) Menurut (Rivai, 2020) Pembiayaan atau financing adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Menurut teori dari Sukmayanti (2020) Pembiayaan adalah persentase tertentu yang ditetapkan per tahun, perhitungan margin keuntungan secara harian, maka jumlah hari dalam setahun ditetapkan 360 hari, perhitungan margin secara bulanan maka ditetapkan 12 bulan. Pada umumnya, nasabah melakukan pembayaran secara angsuran. Pembiayaan perbankan menjadi salah satu faktor yang dapat menaikkan pendapatan UMKM karena dengan adanya pembiayaan perbankan akan menjadi salah satu cara bagi para pengusaha UMKM untuk mendapatkan suntikan modal kerja yang bisa digunakan untuk meningkatkan usaha

yang telah dimiliki hal ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Prayogi (2017) dengan judul penelitian “Pengaruh Pembiayaan Mikro Syariah Terhadap Tingkat Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)” menunjukkan hasil bahwa pembiayaan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pendapatan UMKM.

Perkembangan BRI yang merupakan salah satu lembaga keuangan yang memiliki program pembiayaan yang sangat mendukung perkembangan para pengusaha mikro. Dukungan tersebut direalisasikan dengan mengeluarkan sebuah produk yang berupa pembiayaan bagi para pengusaha mikro dengan yang diberi nama Unit Mikro BRI iB (Pembiayaan Mikro iB) yang bertujuan untuk kebutuhan tambahan modal ataupun investasi. Dengan adanya program pembiayaan tersebut para pengusaha mikro dapat tambahan pinjaman modal sehingga bisa mengembangkan usahanya. Pembiayaan Mikro pada PT. BRI sendiri menggunakan perjanjian harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. dimana bank menyediakan pembiayaan untuk pembelian bahan baku atau bahan modal kerja lainnya yang dibutuhkan nasabah, yang akan dibayar kembali oleh nasabah sebesar harga jual bank = (harga beli bank + margin keuntungan) pada waktu yang telah ditetapkan (Adiwarman, 2020)

Bank BRI baru saja mengumumkan bahwa pada tanggal 6 Maret 2023, pendaftaran KUR BRI 2023 di Kabupaten Jember dibuka untuk umum. KUR BRI atau Kredit Usaha Rakyat BRI adalah program pinjaman dari Bank BRI yang ditujukan untuk membantu masyarakat kecil dan menengah di Kabupaten Jember dalam memperoleh modal usaha dengan bunga yang rendah dan proses pengajuan yang mudah. Untuk mengajukan KUR BRI 2023 di Kabupaten Jember, calon debitur wajib datang ke kantor BRI terdekat. Meskipun pendaftaran online melalui situs kur.bri.co.id belum tersedia, namun pengajuan langsung ke kantor cabang BRI dapat dilakukan dengan mudah. Sebelumnya, calon debitur sebaiknya mengetahui syarat pengajuan KUR BRI, besaran suku bunga pinjaman BRI tanpa jaminan, dan tabel angsuran KUR BRI 2023 yang terbaru. Syarat pengajuan KUR BRI di Kabupaten Jember cukup mudah, calon debitur hanya perlu memenuhi persyaratan umum seperti memiliki usaha kecil atau menengah, memiliki usia usaha minimal 6

bulan, dan berdomisili di wilayah yang menjadi target KUR BRI. Selain itu, calon debitur juga diwajibkan untuk menyediakan dokumen pendukung seperti KTP, NPWP, dan surat izin usaha. Suku bunga pinjaman BRI di Kabupaten Jember tanpa jaminan saat ini sekitar 7% per tahun, dengan jangka waktu peminjaman hingga 5 tahun. Namun, besaran suku bunga dapat berbeda-beda tergantung dari kondisi keuangan calon debitur, kualitas usaha, dan besaran pinjaman yang diajukan. Untuk mengetahui besaran cicilan bulanan, calon debitur dapat melihat tabel angsuran KUR BRI terbaru di Kabupaten Jember. Dalam tabel tersebut terdapat simulasi cicilan pinjaman BRI dengan berbagai besaran pinjaman dan jangka waktu peminjaman. (Tribun.com, 2023)

Pinjaman KUR BRI dapat membantu UMKM dalam mengembangkan bisnis mereka, seperti memperluas jaringan distribusi atau meningkatkan kualitas produk dan layanan. Dengan adanya KUR BRI 2023, UMKM dapat lebih mudah memperoleh akses ke pembiayaan dan memperluas bisnis mereka. Dalam mengajukan pinjaman KUR BRI 2023 di Kabupaten Jember, UMKM perlu mempersiapkan semua persyaratan dan dokumen yang dibutuhkan dengan lengkap. Hal ini termasuk laporan keuangan usaha dan perencanaan penggunaan KUR. Selain itu, UMKM juga harus memperhatikan deadline pengajuan KUR BRI 2023 agar tidak melewatkan kesempatan ini. KUR BRI 2023 pinjaman tanpa jaminan memiliki batas limit di bawah Rp 100 juta. Di mana, suku bunga KUR BRI plafon Rp 10 juta hingga Rp 100 juta adalah 6 persen per tahun atau 0,28 persen per bulan tetap hingga pelunasan. Sementara itu, bagi pinjaman KUR BRI 2023 di Kabupaten Jember dengan limit di bawah Rp 10 juta atau disebut Super Mikro, suku bunga yang dikenakan adalah rendah, yaitu 3 persen hingga lunas tanpa agunan. Namun, penting untuk dicatat bahwa suku bunga dapat berubah sesuai kebijakan bank. Untuk mengajukan pinjaman KUR BRI di Kabupaten Jember dengan suku bunga 6 persen, hanya berlaku untuk nasabah baru. Sedangkan bagi debitur yang sudah pernah mengajukan KUR BRI di pengajuan keduanya, akan mendapatkan bunga sebesar 7 persen. Bagi mereka yang telah meminjam tiga kali, suku bunga yang dikenakan akan menjadi 8 persen, dan untuk pengajuan terakhir, suku bunga menjadi 9 persen. Pada dasarnya, KUR BRI 2023 adalah program pinjaman tanpa

jaminan yang disediakan oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI) untuk membantu usaha kecil dan menengah di Kabupaten Jember. Program ini bertujuan untuk memberikan akses pembiayaan yang mudah dan terjangkau bagi masyarakat yang ingin memulai usaha atau mengembangkan usahanya. Calon debitur dapat menyesuaikan besaran pinjaman yang diajukan dengan kemampuan membayar cicilan bulanan. Dalam mengajukan KUR BRI di Kabupaten Jember, sebaiknya calon debitur melakukan persiapan yang matang untuk memaksimalkan peluang pengajuan yang disetujui oleh Bank BRI. Pastikan untuk memenuhi semua syarat dan persyaratan yang ditetapkan, serta mengajukan pinjaman dengan besaran yang sesuai dengan kemampuan usaha. Dengan demikian, calon debitur dapat memperoleh modal usaha yang dibutuhkan dengan bunga yang rendah dan proses pengajuan yang mudah. Pihak Bank BRI sedang menawarkan suku bunga yang rendah untuk pinjaman KUR BRI 2023 di Kabupaten Jember yang terjangkau bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang akan mengembangkan atau memulai usahanya. KUR BRI 2023 adalah bagian dari Kredit Usaha Rakyat dari Bank Pemerintah yang juga termasuk Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BSI, dan Bank BTN. Namun, perlu diingat bahwa terdapat beberapa aturan baru yang harus diikuti dalam KUR BRI 2023 di Kabupaten Jember, seperti kewajiban suku bunga yang merujuk pada Permenko Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUR 2023 dan calon peminjam harus memiliki BPJS Ketenagakerjaan. UMKM perlu memahami bahwa verifikasi administrasi yang lengkap, laporan keuangan usaha, dan perencanaan penggunaan KUR menjadi faktor penting dalam kelulusan untuk mendapatkan KUR BRI di Kabupaten Jember yang dibuka pada 6 Maret 2023. (Tribun.com, 2023)

Modal kerja adalah modal lancar yang dipergunakan untuk mendukung operasional perusahaan sehari-hari sehingga perusahaan dapat beroperasi secara normal dan lancar. Beberapa penggunaan modal kerja antara lain adalah untuk pembayaran persekot pembelian bahan baku, pembayaran upah buruh, dan lain-lain. (Litriani,2018) sedangkan menurut Jumingan (2017:66) Modal kerja adalah kelebihan aktiva lancar terhadap utang jangka pendek. Kelebihan ini disebut modal kerja bersih (*net working capital*). Kelebihan ini merupakan jumlah aktiva lancar

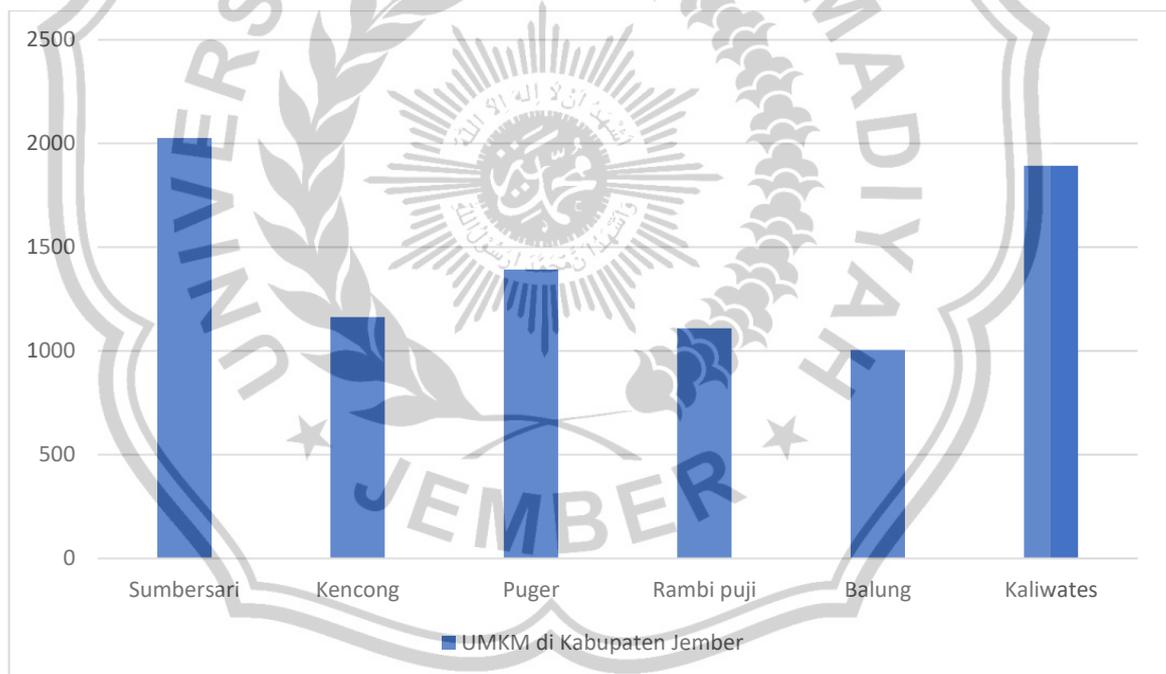
yang berasal dari utang jangka panjang dan modal sendiri. Definisi ini bersifat kualitatif karena menunjukkan kemungkinan tersedianya aktiva lancar yang lebih besar dari pada utang jangka pendek dan menunjukkan tingkat keamanan bagi kreditur jangka pendek serta menjamin kelangsungan usaha di masa mendatang.

Menurut teori dari Putri (2020) Menjelaskan bahwa setiap usaha selalu membutuhkan modal kerja untuk membelanjai operasinya sehari-hari, misalkan untuk pembelian bahan baku, membayar upah, gaji pegawai dan lain sebagainya. Modal kerja yang efektif sangat penting untuk pertumbuhan kelangsungan usaha dalam jangka panjang. Apabila pedagang kekurangan modal kerja untuk memperluas penjualan dan meningkatkan produksinya, maka besar kemungkinan akan kehilangan pendapatan dan keuntungan. Kaitannya modal kerja dengan pendapatan bahwa modal kerja berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan usaha pedagang. Artinya semakin besar atau meningkatnya modal yang dimiliki maka pendapatan yang diperoleh akan semakin meningkat dan sebaliknya jika modal yang dimiliki kecil atau menurun maka pendapatan yang diperoleh pun akan menurun. Modal kerja sangat berpengaruh bagi suatu usaha kecil mikro menengah karena dengan modal kerja yang besar maka pendapatan yang bisa dihasilkan juga akan sejalan dengan berapa banyak modal kerja yang dimiliki hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lestari (2015) Hasil penelitian menunjukkan bahwa modal kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan UMKM rebana di Kabupaten Gresik. Penelitian lain yang menunjukkan bahwa modal kerja berpengaruh terhadap pendapatan UMKM adalah penelitian milik Wirawan (2015) Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa modal kerja memiliki pengaruh paling dominan terhadap pendapatan pelaku UMKM di Kota Denpasar. Strategi bersaing adalah menentukan dan menetapkan tujuan jangka panjang dan jangka pendek perusahaan dengan memberdayakan semua sumber daya yang dimiliki perusahaan sehingga tujuan perusahaan tercapai secara efektif dan efisien. (Fatimah, 2022)

Menurut data dari BPS (Badan Pusat Statistik) Kabupaten Jember tahun 2023 Kecamatan Sumbersari memiliki nilai yang lebih tinggi di antara 30 kecamatan lainnya yakni sebesar 2.026 dibagian akomodasi dan penyediaan makan minum, sedangkan ada 6 kecamatan yakni kecamatan Kencong, Puger, Rambipuji, Balung,

kaliwates, dan patrang, menempati perolehan nilai ke 2 yakni kurang lebih sebesar 2.000 unit UMKM.( BPS 2023) Pendapatan merupakan tujuan utama dari pendirian suatu perusahaan. Sebagai suatu organisasi yang berorientasi profit maka pendapatan mempunyai peranan yang sangat besar. Pendapatan merupakan faktor penting dalam operasi suatu perusahaan, karena pendapatan akan mempengaruhi tingkat laba yang diharapkan akan menjamin kelangsungan hidup perusahaan. (Lestari, 2021). Sedangkan Menurut Harnanto (2019:102) menuliskan bahwa pendapatan adalah “kenaikan atau bertambahnya aset dan penurunan atau berkurangnya liabilitas perusahaan yang merupakan akibat dari aktivitas operasi atau pengadaan barang dan jasa kepada masyarakat atau konsumen pada khususnya.

**Tabel 1. 2**  
**UMKM di Kabupaten Jember**



Sumber : BPS 2023

UMKM di Kabupaten Jember pada tahun 2023 tercatat memiliki total 24.101 UMKM yang bergerak di bidang Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum sedangkan di kecamatan Sumpalsari terdapat 2.026 UMKM yang bergerak di bidang Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum. Namun sama halnya dengan UMKM yang lainnya, UMKM di Sumpalsari juga banyak mengalami kendala salah

satunya permodalan dan pelatihan, dimana hal ini merupakan salah satu penyebab UMKM di Summersari mengalami perkembangan yang tergolong lambat.

Dari penjelasan di atas terdapat fenomena bahwasanya sebelum adanya pembiayaan perbankan, modal kerja, dan pelatihan, pendapatan UMKM di Jember bergerak secara tidak konsisten, dengan adanya produk pembiayaan mikro dapat membantu para pelaku UMKM dalam mengatasi permodalan, karena modal menjadi salah satu pokok permasalahan. Modal tersebut bisa digunakan untuk pengembangan usahanya, dengan berkembangnya usaha yang dijalankan tersebut akan mempengaruhi pendapatan yang diperoleh. Tetapi menurut survey awal (wawancara singkat) yang dilakukan, fenomena yang terjadi saat ini ialah tidak semua usaha yang diberikan pembiayaan mikro dapat menjalankan usahanya dengan baik, yang disebabkan karena pembiayaan yang tidak digunakan sesuai dengan tujuannya, dan fluktuasi harga. Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah tersebut maka peneliti perlu meneliti lebih jauh dan mendalam tentang pengaruh pembiayaan perbankan dan modal kerja terhadap pendapatan UMKM di Kecamatan Summersari Jember. Sehingga peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian ini dan menulisnya dalam sebuah karya ilmiah skripsi.

## **1.2 Rumusan Masalah**

UMKM di daerah Summersari pada tahun 2022 tercatat ada 24.101 UMKM yang bergerak di bidang Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum dan di kecamatan Summersari terdapat 2.026 UMKM yang bergerak di bidang Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum. Namun sama halnya dengan UMKM yang lainnya, UMKM di Summersari juga banyak mengalami kendala salah satunya permodalan dan pelatihan, dimana hal ini merupakan salah satu penyebab UMKM di Summersari mengalami perkembangan yang tergolong lambat.

Pembiayaan merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.(Litriani, 2018) Sedangkan modal kerja adalah modal lancar yang dipergunakan untuk mendukung operasional perusahaan sehari-hari sehingga perusahaan dapat

beroperasi secara normal dan lancar. Beberapa penggunaan modal kerja antara lain adalah untuk pembayaran persekot pembelian bahan baku, pembayaran upah buruh, dan lain-lain. (Litriani,2018) Maka permasalahan yang dapat dirumuskan oleh peneliti sebagai berikut:

1. Apakah pembiayaan perbankan berpengaruh terhadap pendapatan UMKM di Sumbesari Jember?
2. Apakah modal kerja berpengaruh terhadap pendapatan UMKM di Sumbesari Jember?
3. Apakah pelatihan berpengaruh terhadap pendapatan UMKM di Sumbesari Jember?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis pengaruh pembiayaan perbankan terhadap pendapatan UMKM di Sumbesari Jember.
2. Untuk menganalisis pengaruh modal kerja terhadap pendapatan UMKM di Sumbesari Jember.
3. Untuk menganalisis pengaruh pelatihan terhadap pendapatan UMKM di Sumbesari Jember.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat Teoritis**

Adapun mafaat teoritis yang dapat diperoleh secara teoritis dari penelitian ini adalah:

- a. Hal ini dimaksudkan agar temuan penelitian ini akan memberikan kontribusi bagi kemajuan ilmu manajemen secara umum dengan mengungkapkan jika masalah finansial memiliki dampak langsung pada keberhasilan keuangan UMKM.
- b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai referensi dan sumber informasi dalam pembuatan artikel ilmiah di bidang manajemen khususnya bidang kewirausahaan.

#### **2. Manfaat Praktis**

Manfaat bagi penulis dan bagi peneliti selanjutnya antara lain dapat diwujudkan dalam praktik, sebagai berikut:

a. Bagi Penulis

Diharapkan bahwa dengan mempelajari ilmu manajemen dalam proses perkuliahan, penulis akan dapat mempelajari lebih lanjut tentangnya, membangun keterampilan penalaran, dan memperoleh pola pikir ilmiah, yang kemudian dapat mereka terapkan untuk menulis penelitian ini. Diharapkan bahwa penelitian ini akan memberi penulis pengetahuan dan pengalaman kewirausahaan.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan penelitian ini bisa menjadi penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman, referensi, dan perbandingan bagi para akademisi yang akan melakukan penelitian di sektor yang sama.

